

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis sekarang ini telah menjadi institusi yang paling besar, semakin hari terasa betapa besar pengaruh perusahaan terhadap kehidupan manusia. Merekalah yang diharapkan perannya karena dianggap paling mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan taraf hidup orang banyak juga mendorong kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Namun, dengan prinsip setiap perusahaan yang mencari keuntungan sebesar-besarnya, akhirnya semakin disadari bahwa dampaknya terhadap masyarakat cukup besar dan semakin sulit dikendalikan.

Perluasan tanggung jawab perusahaan dengan dasar pemikiran bahwa pencapaian tujuan perusahaan sangat berhubungan erat dengan pola lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada. Oleh karena itu, perusahaan sebagai organisasi bisnis harus mampu merespon apa yang dituntut oleh lingkungan sosialnya, sehingga entitas bisnis dan entitas sosial dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk kepentingan bersama. Seiring dengan perkembangan konsep tersebut, menjadi bahan pembicaraan bagaimana permasalahan pemberian pinjaman dana program kemitraan perusahaan yang menjadi perhatian terbesar saat ini.

Umumnya perusahaan masih berfokus pada aspek finansial atau aspek ekonomis untuk menunjukkan keberhasilannya, namun perusahaan dunia sekarang sudah memperhitungkan aspek dampak lingkungan dan sosial dalam menjalankan operasi bisnis mereka untuk mempertahankan diri terhadap tekanan sosial melalui pengembangan program *Corporate Social Responsibility*.

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di dalam perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diterapkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan yang dimana dananya disalurkan dalam bentuk pinjaman, sedangkan Program Bina Lingkungan adalah

program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh perusahaan di wilayah usaha melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan yang dananya disalurkan dalam bentuk hibah. Pemberian kredit melalui Program Kemitraan kepada calon mitra binaan mengandung risiko yaitu kemungkinan calon mitra binaan tidak mampu melunasi kredit tepat pada waktunya atau bahkan gagal bayar sama sekali. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan audit internal berupa audit operasional sebagai pengawas jalannya pelaksanaan kegiatan fungsi kredit agar fungsi tersebut dapat melaksanakan aktivitasnya secara efektif dan efisien.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berstatus sebagai perusahaan milik negara. Salah satu wujud kepedulian PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang dalam membina hubungan yang arif dan profesional dengan masyarakat di sekitar perusahaan adalah dengan menyelenggarakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan.

Dalam memberikan pinjaman dana kepada calon mitra binaan untuk Program Kemitraan, tentunya mitra binaan tersebut melalui proses pengajuan kredit dan analisis terhadap kredit yang diajukan. Perusahaan dapat melakukan analisis permohonan kredit calon mitra binaan apabila semua persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan telah terpenuhi. Selain kelengkapan data pendukung permohonan kredit, perusahaan juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon mitra binaan, serta melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kebijakan prosedur pemberian kredit yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang yang tergabung dalam Tim Program Kemitraan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang menyatakan bahwa beberapa tahun terakhir tim Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tidak menjalankan programnya secara baik dan benar dalam artian Tim PKBL belum sepenuhnya aktif menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Banyak mitra binaan yang selalu menunda-nunda waktu pengembalian pinjaman dengan berbagai alasan tanpa adanya peneguran kepada mitra binaan tersebut, terdapat penanggung jawab yang

memiliki perangkapan tugas, dan penanggung jawab monitoring di Tim PKBL tidak melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.

Pemberian kredit yang diberikan kepada mitra binaan tidak semuanya berjalan lancar, sehingga dalam setiap kegiatan perkreditan sangat diperlukan manajemen perkreditan yang baik, salah satunya dengan melakukan pengawasan kredit. Dalam melaksanakan pengawasan diperlukan adanya suatu upaya pengendalian. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah pengendalian intern.

Tim PKBL yang bertanggung jawab dalam Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang telah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing secara tertulis di dalam Surat Keputusan. Untuk menangani Program Kemitraan, perusahaan tidak memiliki struktur organisasi khusus, namun memiliki beberapa penanggung jawab yang disebut sebagai Tim PKBL. Posisi tertinggi dalam Tim PKBL adalah *Executive Vice President* Divisi Regional III Palembang (EVP Divre III Palembang). Tugas dan fungsi masing-masing penanggung jawab telah ditetapkan oleh perusahaan tetapi masih belum berfungsi secara optimal sebagaimana tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam pemberian wewenang dan tanggung jawab, masih ada beberapa penanggung jawab yang melakukan perangkapan tugas. Selain itu, walaupun telah ditetapkan tugas dan fungsi masing-masing, semua penanggung jawab ikut terlibat dalam melakukan penganalisisan kredit sehingga kredit yang diberikan tanpa di dahului oleh analisa kredit yang profesional dapat diragukan mutunya. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian Program Kemitraan belum berjalan lancar.

Pemilihan tim yang tergabung dalam Tim PKBL di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang dipilih langsung oleh *Executive Vice President* Divre III Palembang atas nama Direksi berdasarkan Surat Keputusan. Hingga saat ini, belum adanya pelatihan khusus bagi penanggung jawab yang tergabung dalam Tim PKBL. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya unsur penaksiran risiko yang jelas dalam pengendalian intern Program Kemitraan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang.

Selain itu, penanggung jawab monitoring belum melaksanakan tugasnya secara aktif. Salah satu yang menjadi tugasnya adalah melakukan penagihan

kepada mitra binaan yang terlambat bayar angsuran. Pihak penanggung jawab monitoring yang seharusnya melakukan penagihan sebulan sekali kepada mitra binaan, dilakukan tiga bulan sekali tanpa sepengetahuan dari penanggung jawab yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa unsur pemantauan dalam pengendalian intern Program Kemitraan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang belum berjalan lancar.

Pengendalian intern menjadi salah satu hal penting dalam kegiatan operasional yang dijalankan oleh perusahaan. Pengendalian intern merupakan suatu rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menjaga aset, dan memberikan informasi yang akurat. Struktur pengendalian intern yang baik akan menjamin kelangsungan perusahaan, ketelitian dan keandalan data akuntansi serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat pentingnya pengendalian intern atas prosedur pemberian kredit, maka dalam pembahasan Laporan Akhir ini penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Pengendalian Intern Atas Prosedur Pemberian Kredit Program Kemitraan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat ditentukan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Lemahnya lingkungan pengendalian perusahaan dalam Program Kemitraan karena dalam hal pemisahan tugas masih terdapat pelimpahan wewenang yang cukup luas bagi seorang karyawan dan belum jalannya fungsi penanggung jawab masing-masing yang tergabung dalam Tim Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
2. Lemahnya penaksiran risiko perusahaan dalam Program Kemitraan karena belum adanya pelatihan pembinaan khusus untuk penanggung jawab yang terpilih sebagai personel baru dalam Tim Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

3. Lemahnya aktivitas pemantauan perusahaan dalam menjalankan Program Kemitraan karena penanggung jawab pelatihan dan *monitoring* tidak menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Dari beberapa alternatif-alternatif permasalahan di atas, maka yang menjadi masalah pokok perusahaan adalah belum terlaksananya pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, dan pemantauan atas prosedur pemberian kredit Program Kemitraan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang maka penulis membatasi ruang lingkup penelitiannya yaitu hanya pada pengendalian intern atas prosedur pemberian kredit Program Kemitraan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, , aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan

Tujuan dilakukan pembuatan Laporan Akhir ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pengendalian intern atas prosedur pemberian kredit Program Kemitraan kepada mitra binaan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang terutama dalam hal lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, serta pemantauan.

1.4.2. Manfaat

Penulisan Laporan Akhir ini memiliki manfaat penulisan secara teoritis, maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah bahan referensi bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi dan sebagai acuan bagi penulisan selanjutnya agar dapat terus dikembangkan.
 - b. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengendalian intern atas prosedur pemberian kredit Program Kemitraan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk dijadikan salah satu pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dengan memberikan sumbang saran untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang terjadi.
 - b. Untuk memberikan citra positif kepada masyarakat dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan.

1.5. Metode Pengumpulan Data

1.5.1. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan Laporan Akhir ini, diperlukan data-data yang objektif untuk mempermudah penulis dalam menyusun Laporan Akhir ini. Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data dapat diklasifikasikan menjadi metode dan teknik berikut, yaitu:

1. Riset Lapangan (*Field Research*)
Yaitu riset yang dilakukan dengan mendatangi secara langsung perusahaan yang menjadi objek penulisan. Dalam riset ini penulis menggunakan 3 (tiga cara), yaitu:
 - c. Teknik Wawancara (*Interview*)
Teknik ini merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
 - d. Teknik Pengamatan (*Observation*)
Penulis mengumpulkan data yang menuntut adanya pengamatan dari penelitiannya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.
 - e. Kuisisioner (Angket)
Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuisisioner atau daftar pertanyaan dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.

2. Studi Kepustakaan (*Study Research*)

Dengan menggunakan teknik ini penulis mendapatkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

1.5.2. Sumber Data

Dalam penulisan ini, penulis merujuk pada Juliandi (2014:65) dari sumber perolehannya, data dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri bukan oleh orang lain dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya belum ada. Contoh data primer, adalah data yang dikumpulkan melalui instrumen:

- a. Wawancara/interviu
- b. Angket/kuesioner
- c. Pengamatan/observasi

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh pihak lain. Contoh data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi.

Dalam Laporan Akhir ini, penulis menggunakan data primer terdiri dari *interview* dengan karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang, dan juga menyebar kuisisioner struktur pengendalian intern untuk pengumpulan informasi data. Adapun data sekunder yang penulis gunakan adalah:

1. Data-data prosedur dan syarat-syarat pemberian kredit Program Kemitraan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.
2. Sejarah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.
3. Struktur Organisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.

1.6. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar laporan akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, di mana tiap-tiap bab memiliki hubungan yang satu dengan yang lainnya. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika penulisan Laporan Akhir ini secara singkat yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori dan literatur-literatur yang mendukung dari pembahasan yaitu: pengertian dan jenis-jenis auditing, pengertian dan tujuan pengendalian intern, unsur-unsur pengendalian intern, pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern, pengertian dan tujuan kredit, unsur-unsur kredit, prinsip-prinsip kredit, prosedur pemberian kredit, pengertian dan bentuk-bentuk program kemitraan, serta penentuan penilaian dari hasil kuisioner.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ketiga menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan seperti sejarah singkat perusahaan, visi misi dan budaya perusahaan, struktur organisasi dan pembagian tugas, aktivitas perusahaan, prosedur pemberian kredit program kemitraan, kriteria kinerja program kemitraan dan prosedur pemberian kredit yang dilakukan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang, dan syarat-syarat pemberian kredit.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini penulis menjelaskan hasil analisis dan pembahasan data-data yang diperoleh dan membandingkannya dengan teori pada bab II mengenai analisis pengendalian intern atas prosedur pemberian kredit program kemitraan di PT Kereta Api

Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima menjelaskan kesimpulan dari isi pembahasan dan saran penulis dalam mengatasi permasalahan perusahaan yang ada.